



Judul : Polri Pelajari Hak Imunitas Viktor
Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Polri Pelajari Hak Imunitas Viktor

● MABRURUH, FAUZIAH MURSID

JAKARTA — Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri telah menerima empat laporan terkait ujaran kebencian yang dilakukan politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat. Status Viktor adalah anggota DPR RI sehingga polri menyatakan akan mempelajari hak imunitas Viktor.

"Iya, kita pelajari (hak imunitas)," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/8). Setyo memaparkan, penyidik telah menerima laporan dari beberapa partai. Penyidik akan mempelajari laporan maupun hak imunitas tersebut.

Anggota DPR, kata Setyo, memang memiliki hak-hak khusus yang tidak bisa disamakan dengan masyarakat biasa. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk mempelajari hak imunitas serta mengkaji dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan Viktor dalam pidatonya.

"Makanya, harus kita lihat juga faktor-faktor itu, dinyatakan dalam hal apa dan dalam konteks apa, karena anggota dewan punya hak-hak khusus, *enggak* bisa kita samakan," terangnya.

Setyo melanjutkan, penyidik juga mengkaji status Viktor saat kunjungan dan pidato tersebut sebagai anggota dewan atau hanya sebagai tokoh masyarakat. "Jadi, nanti proses kita lihat bagaimana perkembangannya," kata dia.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri pada Senin (7/8) kembali menerima pengaduan dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua laporan tersebut diterima dengan nomor



LP/781/VIII/2017/Bareskrim tanggal 7 Agustus 2017 milik Demokrat dan LP/779/VIII/2017 milik PKS.

Selain melapor ke polisi, PKS dan Partai Demokrat resmi melaporkan Viktor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin. Pelapor PKS diwakili oleh Ketua DPP PKS Departemen Hukum dan HAM Zainudin Paru lebih dahulu mendatangi MKD sekitar pukul 15.45 WIB. Zainudin mendatangi MKD setelah sebelumnya lebih dahulu melaporkan Viktor ke Bareskrim Polri.

"Pengaduan kami meminta agar ini segera dipanggil kemudian diperiksa dan meminta MKD memecat jika memang dugaan itu terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI," ujar Zainudin di depan ruangan MKD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/8).

Zainudin mengungkapkan, terkait pelaporannya tersebut, pihaknya membawa sejumlah bukti, di antaranya rekaman video pernyataan Viktor berdurasi panjang dan singkat. Ia pun berharap MKD segera menindaklanjuti pelaporan tersebut.

"Lebih cepat, lebih baik, ya, yang sebagaimana biasa kami laporkan juga ke Bareskrim, ternyata teman-teman lain ada yang mendahului (pada) hari Jumat, PAN dan Gerindra," ungkapnya.

Selang beberapa menit setelahnya, giliran Partai Demokrat yang diwakili oleh Generasi Muda Demokrat melaporkan Viktor. Wakil Ketua Umum Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal, Primawira, yang melaporkan Viktor mengungkapkan, kedatangan pihaknya ke MKD guna melaporkan dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota dewan.

Untuk pelaporannya tersebut, ia juga membawa bukti video dan dokumen berisi pernyataan Viktor di NTT. "Tuntutan kita adalah, pertama, kita mau (menuntut) minta maaf secara terbuka kepada Partai Demokrat dan seluruh kader, khususnya di NTT," ujar Primawira.

Senada dengan PKS, Prima yang mengaku mewakili Partai Demokrat tersebut berharap MKD bisa mempercepat proses penegakan etik. Selain itu, jika dalam prosesnya yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, Partai Demokrat berharap yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi etik yang berat. ■ ed: muhammad hafil